# LAPORAN LAYANAN INFORMASI dan DOKUMENTASI (LLID) TAHUN 2022

PANCACITA

**PEMERINTAH ACEH**

**DINAS SYARIAT ISLAM**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Aceh Tahun Anggaran 2022 telah berjalan dengan baik sesuai beban tugas Dinas Syariat Islam Aceh.

Laporan Kinerja Bidang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik ini merupakan hasil pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Aceh yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Aceh dengan sumber anggaran dari APBA Tahun 2022 pada Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Syariat Islam Aceh. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan kewajiban Pemerintah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah.

Dasar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Aceh diantaranya adalah Peraturan Gubemur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh dan Keputusan Gubemur Aceh Nomor 903/78/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh. Dalam perjalanannya Dinas Syariat Islam Aceh juga telah mengembangkan berbagai sarana dan prasarana yang memadai guna Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Aceh, termasuk mengembangkan aplikasi pendokumentasian dan pelayanan informasi secara Online berbasis Website dan juga telah dikembangkan dalam versi Android. Sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, mudah dan murah.

Demikian laporan ini disampaikan untuk seperlunya. Terimakasih.

# DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... i
DAFTAR ISI ..... ii
DAFTAR LAMPIRAN..... iii
DAFTARGAMBAR ..... iv

**A. GAMBARAN UMUM PPID PEMBANTU DSI ACEH** ..... 1
1. Dasar Hukum ..... 1
2. Struktur PPID DSI Aceh ..... 2
3. Sarana Layanan Informasi ..... 3
4. Tugas dan Wewenang PPID Pembantu ..... 4

**B. LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK** ..... 4
1. Mekanisme Perolehan Informasi ..... 4
2. Tata Cara Permohonan ..... 5
3. Tata Cara Pengajuan Keberatan ..... 6
4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak ..... 6
5. Sengketa Informasi Publik ..... 7
6. Hambatan dan Kendala dalam Pelayanan Publik ..... 7
7. Prestasi Informasi Publik ..... 7

**C. PENUTUP** ..... 8

# DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh  Nomor : Kep/903/0021/2022

Daftar Informasi Publik Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2022

# DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Bagan Struktur PPID DSI Aceh Tahun 2022 ..... 3

# PENDAHULUAN

## A. Gambaran Umum PPID DSI Aceh

### 1. Dasar Hukum

Peraturan Gubemur Aceh Nornor 39 Tahun 2012 tentang Pedornan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokurnentasi yang telah rnengalarni beberapa kali perubahan terakhir Peraturan Gubemur Aceh Nornor 60 Tahun 2020 tentang Pedornan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokurnentasi di Lingkungan Pernerintah Aceh.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokurnentasi (PPID) Aceh pertarna kali ditunjuk pada Tahun 2010 saat Gubemur Aceh Irwandi Yusuf rnengeluarkan surat Keputusan Gubemur Aceh, surat Keputusan Nornor 480/590/2010 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokurnentasi di Lingkungan Pernerintah Aceh, sebagairnana telah direvisi beberapa kali dan yang terakhir Surat Keputusan Gubemur Aceh Nornor 480/46/2021 tentang Penetapan PPID di Lingkungan Pernerintah Aceh.

Regulasi tentang Penetapan PPID Aceh ini didasarkan pada arnanah Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pernerintah Nornor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP dan Peraturan Kornisi Informasi Nornor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Regulasi yang disebutkan di atas, rnerupakan payung hukurn bagi PPID untuk rnengirnplernentasikan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pernerintah Aceh.

Pada tataran irnplernentasi, PPID Aceh berusaha rneningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik. Hal tersebut tidak lain adalah untuk rnewujudkan tujuan Pasal 3 UU KIP. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 3 Tahun 2017 tentang Pedornan Pengelolaan Inforrnasi dan Dokurnentasi di lingkungan Kernenterian Dalarn Negeri dan Pernerintah Daerah, rnenuntut agar Pernerintah dan Pernerintah Daerah segera rnenetapkan dan rnengernbangkan sistern Pelayanan pada PPID di Badan Publik.

Secara berurutan kebijakan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pernerintah Aceh berpedornan kepada beberapa aturan turunan yaitu Qanun Aceh

Nornor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Gubemur Aceh Nornor 39 Tahun 2012 dan Nornor 57 Tahun 2018 tentang Pedornan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Aceh, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Gubemur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh yang telah direvisi sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 dan Permenkominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Keputusan Gubemur Nomor 903/78/2022 tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh dan Keputusan Gubemur Nomor 065/1331/2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Dinas Syariat Islam Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 903/0021/2022 tentang Pembentukan Susunan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Syariat Islam Aceh Tahun Anggaran 2022. Data dan Informasi Publik yang disediakan oleh PPID Pembantu Dinas Syariat Islam Aceh dapat di akses pada website https://dsi.acehprov.go.id/informasi-publik/. Dalam hal ini, pemohon informasi biasanya melakukan permintaan informasi melalui website http://ppid.acehprov.go.id yang nantinya petugas informasi akan memeriksa dan merekap permintaan informasi setiap harinya.

**2. Struktur PPID DSI Aceh**

Dalam melaksanakan pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintah Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh telah mengeluarkan Surat Keputusan yang telah diubah beberapa kali yang terakhir adalah Dinas Syariat Islam Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 903/0021/2022 tentang Perubahan Pembentukan Susunan Tim Sekretariat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Syariat Islam Aceh yang terdiri dari Kepala Dinas sebagai Penanggungjawab, Sekretaris Dinas sebagai Pengarah, Kasubbag Umum sebagai Koordinator, Kasubbag Program sebagai Ketua Layanan Informasi, Kasubbag Keuangan sebagai Ketua Pengelola Informasi, Kasubbag Kepegawaian sebagai Ketua Dokumentasi dan Arsip, dan Kasubbag TU UPTD MRB sebagai Ketua Pengaduan dan Sengketa Informasi yang terlihat dalam bagan struktur PPID DSI Aceh di bawah ini:

Gambar 2.1 Bagan Struktur PPID DSI Aceh Tahun 2022

### 3. Sarana Layanan Informasi

Pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Aceh selama ini berada di bawah koordinasi Kepala Dinas Syariat Islam Aceh selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana. Sementara untuk Sekretariat PPID DSI Aceh, Desk Layanan Informasi selama ini berada pada Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 21 Banda Aceh. Gedung tersebut sangat representatif, lokasi dapat dijangkau dan akses transportasi yang mudah, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menemukan lokasi sekretariat untuk mengakses informasi secara langsung, sementara pelayanan secara online, PPID DSI Aceh telah membangun sistem yang terintegrasi keseluruh SKPA sehingga dapat diakses melalui situs resmi Pemerintah Aceh, https://dsi.acehprov.go.id/ dan https://ppid.acehprov.go.id dan dapat diakses juga melalui android.

### 4. Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana

Adapun Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana sebagai berikut:

a. Mengkoordinasikan dan mengkonsilidasikan pengumpul bahan informasi dan dokumentasi dari Unit Kerja.
b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
d. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.
e. Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang diketahui/disetujui oleh kepala SKPD/Unit Kerja.

## B. Layanan Permohonan Informasi Publik

Layanan permohonan informasi publik telah diatur dalarn Peraturan Kornisi Inforrnasi Nornor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi dan Keputusan Gubemur Aceh Nornor 065/1331/2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di Pernerintah Aceh. Keputusan Gubemur Aceh tersebut berisikan Standar Operasional Prosedur (SOP) rnengenai Pengelolaan Perrnohonan Informasi, Pengelolaan Atas Keberatan Informasi, Penanganan Sengketa Informasi, Penetapan dan Pernutakhiran Daftar Informasi dan Dokurnentasi Publik (DIDP), Pengujian tentang Konsekuensi, Pendokurnentasian Informasi Publik, Pendokurnentasian Inforrnasi yang Dikecualikan serta Pelaporan dan Evaluasi.

### 1. Mekanisme Perolehan Informasi

Adapun rnekanisrne perolehan informasi yaitu pernohon rnenyarnpaikan permohonan informasi rnelalui aplikasi PPID Aceh, surat atau datang langsung ke ternpat layanan PPID Aceh. Pernohon rnengisi Forrnulir Permohonan Informasi dan rnernberikan salinan identitas diri/organisasi/lernbaga. Pernohon rnenerirna tanda bukti perrnohonan informasi termasuk nornor pendaftaran/register dari petugas apabila syarat permohonan informasi telah dilengkapi dan sudah diverifikasi. Paling larnbat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterirnanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib rnenyarnpaikan pernberitahuan tertulis yang berisikan:

- ✓ Informasi yang dirninta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak.
- ✓ Badan Publik wajib rnernberitahukan Badan Publik yang rnenguasai informasi yang dirninta apabila informasi yang dirninta tidak berada di bawah penguasaannya

dan Badan Publik yang rnenerirna permintaan rnengetahui keberadaan informasi yang dirninta.

- ✓ Penerimaan atau penolakan perrnintaan dengan alasan informasi yang dirninta rnerupakan informasi yang dikecualikan (dirahasiakan).
- ✓ Dalam hal permintaan diterirna seluruhnya atau sebagian dicanturnkan rnateri informasi yang akan diberikan.
- ✓ Dalam hal suatu dokurnen rnengandung rnateri yang dikecualikan rnaka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitarnkan dengan disertai alasan dan rnaterinya.
- ✓ Alat penyarnpai dan format informasi yang akan diberikan.
- ✓ Biaya serta cara pernbayaran untuk rnernperoleh informasi yang dirninta.

Badan Publik yang bersangkutan dapat rnernperpanjang waktu untuk rnengirirnkan pernberitahuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, paling larnbat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan rnernberikan alasan secara tertulis.

**2. Tata Cara Permohonan Informasi**

Pada prinsipnya perolehan inforrnasi itu adalah bersifat cepat, tepat waktu dan biaya ringan oleh karena itu tata cara permohonan harus dibuat sederhana sehingga rnasyarakat dapat rnengakses informasi dengan rnudah baik rnelalui desk layanan rnaupun rnelalui aplikais PPID secara online.

Adapun tata cara perrnohonan informasi sesuai SOP rnengenai Pengelolaan Permohonan Informasi yang tertuang dalarn Keputusan Gubemur Aceh Nornor 065/1331/2021 yaitu pernohon rnengisi Formulir Permohonan Informasi rnelalui aplikasi PPID, rnengirirn surat atau rnendatangi langsung ke pusat layanan dan rnernberikan salinan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta akte lembaga baik pemohon dari organisasi. Pemohon harus menyebutkan nama, alamat, jenis informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.

Kemudian, petugas akan memeriksa kelengkapan syarat permohonan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan permohonan beserta nomor pendaftaran/register permohonan setelah proses verifikasi. Informasi yang diminta apabila tersedia di aplikasi atau pusat layanan, petugas bisa menyerahkan langsung. Jika tidak, petugas akan meneruskan permohonan ke instansi atau bagian terkait. Informasi yang diminta akan diserahkan bersama tanda bukti penyerahan kepada pemohon.

### 3. Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pengajuan keberatan akan dilakukan oleh pemohon informasi apabila ditemukannya alasan sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 pasal 30. Tata cara pengajuan keberatan juga disebut dalam SOP mengenai Pengelolaan Atas Keberatan Informasi yang tertuang dalam Keputusan Gubemur Aceh Nomor 065/1331/2021.

Tata caranya yaitu pemohon mengisi Formulir Pengajuan Keberatan melalui aplikasi PPID, mengirim surat atau mendatangi langsung ke pusat layanan yang ditujukan ke atasan PPID. Petugas mengklarifikasi persyaratan keberatan yang diajukan. Setelah lengkap dan terverifikasi, petugas menyerahkan nomor register keberatan dalam tanda bukti penerimaan permohonan keberatan.

Petugas melalui PPID menelaah dan berkoordinasi dengan instansi terkait terhadap pengajuan keberatan dari pemohon. Hasil koordinasi tersebut dibuat menjadi draf tanggapan yang disampaikan kepada atasan PPID. Atasan PPID menyerahkan tanggapan keberatan melalui petugas.

### 4. Jumlah Permohonan yang dikabulkan dan ditolak

Jumlah Permohonan Informasi Publik dalam kurun bulan Januari hingga 30 Desember 2022, PPID DSI Aceh tidak menerima permohonan informasi publik yang diajukan oleh individu.

| No | Permohonan Informasi Publik |
|---|---|
| 1 | NIHIL |

**5. Sengketa Informasi Publik**

Pada tahun 2022, PPID Pembantu DSI Aceh tidak mendapatkan gugatan/keberatan atau sengketa oleh masyarakat. Hal ini dapat dinilai bahwa secara keseluruhan permohonan informasi telah terselesaikan dengan baik dan proporsional.

| No | Permohonan Informasi Publik |
|---|---|
| 1 | NIHIL |

**6. Hambatan dan Kendala dalam Pelayanan Publik**

Aktivitas PPID Pembantu pada DSI Aceh yang kian meningkat dirasa menjadi tantangan dan kendala tersendiri mengingat para pemangku pelaksana kegiatan PPID juga merupakan pejabat struktural yang mengemban tupoksi jabatan yang tak kalah banyak dan sangat penting.

**7. Prestasi Informasi Publik**

Pada tahun 2022, PPID Pelaksana DSI Aceh meraih prestasi Peringkat 3 Kualifikasi Informatif Tahun 2022 untuk Kategori SKPA.

# PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan PPID Pembantu pada Dinas Syariat Islam Aceh ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di sepanjang tahun 2022. Semoga dapat menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai. Harapan kami semoga laporan ini akan menambah semangat dan motivasi untuk dapat meningkatkan progress kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2022.

**LAMPIRAN 1**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH**

**NOMOR : KEP/903/0021/2022**

# PEMERINTAH ACEH
# DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

**Jln. T. Nyak Arief No. 221 Telp. (0651) 7551313, Fax. (0651) 7551314**

**Banda Aceh, 23114**


KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH
NOMOR : KEP/903/0021/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mewajibkan kepada setiap Badan Publik termasuk Dinas Syariat Islam Aceh untuk menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik kepada setiap permohonan yang ingin mendapatkan informasi publik;

b. bahwa untuk kelancaran penanganan tugas Pengelola Informasi dan Dukumentasi pada Dinas Syariat Islam Aceh, perlu menetapkan Tim Sekretariat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;

Dipindai dengan CamScanner

9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dan Penjelasannya;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Aceh;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu pada Dinas Syariat Islam Aceh dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Syariat Islam Aceh sebagai tersebut dalam diktum ke satu terdiri dari Pengarah, Koordinator, Anggota Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi.

KETIGA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Dinas Syariat Islam Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, menyimpan, mendokumentasikan dan atau memberikan pelayanan informasi meliputi:

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
c. Informasi yang disediakan setiap saat;
d. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
e. Menyusun rangkuman laporan hasil kegiatan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Syariat Islam Aceh Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2022, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Dipindai dengan CamScanner

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal: 19 JANUARI 2022 M
16 JUMADIL AKHIR 1443 H

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH,

PEMERINTAH ACEH
DINAS
SYARIAT ISLAM

Dr. EMK ALIDAR, S. Ag, M. Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740626 199402 1 003

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:
1.Gubernur Aceh;
2.Ketua DPRA;
3.Inspektur Aceh;
4.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
5.Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh;
6.Karo Organisasi Setda Aceh;
7.Karo Humas Setda Aceh.-

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM
TENTANG SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS SYARIAT ISLAM TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : KEP/903/0021/2022
TANGGAL : 19 JANUARI 2022 M
16 JUMADIL AKHIR 1443 H

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | Dr. EMK Alidar, S. Ag, M. Hum | Kepala Dinas Syariat Islam Aceh | Penangungjawab |
| 2 | Muhibuthibri, S. Ag | Sekretaris Dinas | Koordinator |
| I | **Bidang Pelayanan Informasi** | | |
| 3 | Yenni Triana, SE. M. Si, Ak, CA | Kasubbag Perencanaan & Program | Ketua Layanan Informasi |
| 4 | Abdusy Syakur, S. Pd. I | Tenaga Kontrak Website DSI Aceh | Anggota |
| 5 | Abdullah, S. Pd. I | Tenaga Kontrak Administrasi | Anggota |
| II | **Bidang Pengelola Informasi** | | |
| 6 | Malek Ridwan, S. Sos. I | Kasubbag Umum | Ketua Pengelola Informasi |
| 7 | Nova Muliana, S. Hum | Tenaga Administrasi dan Website DSI Aceh | Anggota |
| 8 | EMK Muntadhir, S. Sos | Tenaga Kontrak Teknis | Anggota |
| III | **Bidang Dokumentasi dan Arsip** | | |
| 9 | Abdul Muid, SE | Kasubbag Keuangan | Ketua Dokumentasi dan Arsip |
| 10 | Irhamdi, STH | Tenaga Kontrak operator komputer | Anggota |
| IV | **Bidang Pengaduan dan Sangketa** | | |
| 11 | Saifan Nur, S. Ag, M. Si | Kasubbag TU UPTD Pengelola MRB | Ketua Pengaduan dan Sangketa Informasi |
| 12 | Makhraja SK | Tenaga Kontrak Teknis | Anggota |
| 13 | Zulfikri, S. IP | Tenaga Administrasi | Anggota |

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

DR. EMK ALIDAR, S. Ag, M. Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740626 199402 1 003

Dipindai dengan CamScanner

# LAMPIRAN 2

# DAFTAR INFORMASI PUBLIK

# DINAS SYARIAT ISLAM ACEH TAHUN 2022

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**
**Dinas Syariat Islam Aceh**
**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**
**Jl. T. Nyak Arief No 221, Banda Aceh Telp/Fax.: (0651) 7551313, 7551312, 7551314 ; E-mail : dsi@acehprov.go.id**

# DAFTAR INFORMASI PUBLIK
# TAHUN 2022

**--- BERKALA ---**

| NO. | RINGKASAN ISI INFORMASI | PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI | PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI | TEMPAT DAN WAKTU PEMBUATAN | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA | | | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CETAK | REKAM | ONLINE | |
| 1. | **Profil Badan Publik :** | | | | | | | |
| | 1) Informasi Tentang Kedudukan Atau Domisili Beserta Alamat Lengkap;Ruang Lingkup Kegiatan Maksud Dan Tujuan;Tugas Dan Fungsi BP Beserta Kantor Unit Dibawahnya<br>2) Struktur Organisasi, Gambaran Umum Setiap Satuan Kerja, Profil Singkat Pejabat Struktural<br>3) Laporan Harta Kekayaan Bagi Pejabat Negara Yang Wajib Melakukannya Yang Telah Diperiksa, DiVerifikasi, Dan Telah Dikirimkan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Ke Badan Publik Untuk Diumumkan. | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala<br>Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |
| 2. | **Ringkasan Informasi Tentang Program** dan/atau Kegiatan Yang Sedang Dijalankan Dalam Lingkup Badan Publik Yang Sekurang-Kurangnya Terdiri Atas:<br>1) Nama Program Dan Kegiatan<br>2) Penanggungjawab, Pelaksana Program dan Kegiatan Serta Nomor Telepon dan/atau Alamat Yang Dapat Dihubungi<br>3) Target dan/atau Capaian Program dan Kegiatan<br>4) Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan<br>5) Anggaran Program dan Kegiatan Yang Meliputi Sumber dan Jumlah<br>6) Agenda Penting Terkait Pelaksanaan Tugas Badan Publik<br>7) Informasi Khusus Lainnya Yang Berkaitan Langsung Dengan Hak-Hak Masyarakat<br>8) Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai dan/atau Pejabat | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala<br>Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Badan Publik Negara<br>9) Informasi Tentang Penerimaan Calon Peserta Didik Pada Badan Publik Yang Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Untuk Umum; | | | | | | | |
| 3. | **Ringkasan Informasi Tentang Kinerja** Dalam Lingkup Badan Publik Berupa Narasi Tentang Realisasi Kegiatan Yang Telah Maupun Sedang Dijalankan Beserta Capaiannya; | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala<br>Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |
| 4. | **Ringkasan Laporan Keuangan** Yang Sekurang-Kurangnya Terdiri Atas:<br>1) Rencana Dan Laporan Realisasi Anggaran<br>2) Neraca<br>3) Laporan Arus Kas Dan Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Dengan Standar Akuntansi Yang Berlaku<br>4) Daftar Aset dan Investasi; | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala<br>Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |
| 5. | **Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik** Yang Sekurang-Kurangnya Terdiri Atas:<br>1) Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima<br>2) Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik<br>3) Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya dan Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak<br>4) Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala<br>Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |
| 6. | **Informasi Tentang Peraturan, Keputusan,** dan/atau Kebijakan Yang Mengikat Dan/Atau Berdampak Bagi Publik Yang Dikeluarkan Oleh Badan Publik Yang Sekurang-Kurangnya Terdiri Atas:<br>1) Daftar Rancangan Dan Tahap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala<br>Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Keputusan, dan/atau Kebijakan Yang Sedang Dalam Proses Pembuatan<br>2) Daftar Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan Yang Telah Disahkan Atau Ditetapkan; | | | | | | | |
| 7. | **Informasi Tentang Hak Dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik,** Serta Tata Cara Pengajuan Keberatan Serta Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Berikut Pihak-pihak Yang Bertanggungjawab Yang Dapat Dihubungi; | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala<br>Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |
| 8. | **Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan** Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran Yang Dilakukan Baik Oleh Pejabat Badan Publik Maupun Pihak Yang Mendapatkan Izin atau Perjanjian Kerja Dari Badan Publik Yang Bersangkutan; | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala<br>Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |
| 9. | **Informasi Tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa** Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait; | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala<br>Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |
| 10. | **Informasi Tentang Prosedur Peringatan Dini Dan Prosedur EVakuasi** Keadaan Darurat Di Setiap Kantor Badan Publik. | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala<br>Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |
| | | | | | | | | |

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**
**Dinas Syariat Islam Aceh**
**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**
**Jl. T. Nyak Arief No 221, Banda Aceh Telp/Fax.: (0651) 7551313, 7551312, 7551314 ; E-mail : dsi@acehprov.go.id**

# DAFTAR INFORMASI PUBLIK
# TAHUN 2022

**--- SERTA MERTA---**

| NO. | RINGKASAN ISI INFORMASI | PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI | PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI | TEMPAT DAN WAKTU PEMBUATAN | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA | | | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CETAK | REKAM | ONLINE | |
| 1. | 1) Setiap Badan Publik Yang Memiliki Kewenangan Atas Suatu Informasi Yang Dapat Mengancam Hajat Hidup Orang Banyak dan Ketertiban Umum dan/atau Badan Publik Yang Berwenang Memberikan Izin dan/atau Melakukan Perjanjian Kerja Dengan Pihak Lain Yang Kegiatannya Berpotensi Mengancam Hajat Hidup Orang Banyak dan Ketertiban Umum Wajib Memiliki **Standar Pengumuman** Informasi Serta Merta. | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala<br>Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |
| | 2) Informasi Yang Dapat Mengancam Hajat Hidup Orang Banyak dan Ketertiban Umum Meliputi Antara Lain:<br>a. Bencana Sosial Seperti Kerusuhan Sosial, Konflik Sosial Antar Kelompok atau Antar Komunitas Masyarakat dan Teror;<br>b. Informasi Tentang Rencana Gangguan Terhadap Utilitas Publik. | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala<br>Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | - | **5 Tahun** |
| | 3) Informasi Yang Dapat Mengancam Hajat Hidup Orang Banyak dan Ketertiban Umum Meliputi Antara Lain:<br>a. Bencana Sosial Seperti Kerusuhan Sosial, Konflik Sosial Antar Kelompok atau Antar Komunitas Masyarakat dan Teror;<br>b. Informasi Tentang Rencana Gangguan Terhadap Utilitas Publik. | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala<br>Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4) **Standar Pengumuman Informasi** Sekurang-Kurangnya Meliputi:<br>a. Potensi Bahaya Dan/Atau Besaran Dampak Yang Dapat Ditimbulkan;<br>b. Pihak-Pihak Yang Berpotensi Terkena Dampak Baik Masyarakat Umum Maupun Pegawai Badan Publik Yang Menerima Izin Atau Perjanjian Kerja Dari Badan Publik Tersebut;<br>c. Prosedur dan Tempat EVakuasi Apabila Keadaan Darurat Terjadi;<br>d. Cara Menghindari Bahaya dan/atau Dampak Yang Ditimbulkan;<br>e. Cara Mendapatkan Bantuan Dari Pihak Yang Berwenang;<br>f. Pihak-Pihak Yang Wajib Mengumumkan Informasi Yang Dapat Mengancam Hajat Hidup Orang Banyak dan Ketertiban Umum;<br>g. Tata Cara Pengumuman Informasi Apabila Keadaan Darurat Terjadi;<br>h. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Badan Publik dan/atau Pihak-Pihak Yang Berwenang Dalam Menanggulangi Bahaya dan/atau Dampak Yang Ditimbulkan. | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala<br>Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 5) Badan Publik Wajib Mematuhi Pelaksanaan Standar Pengumuman Informasi Serta Merta, Serta Memastikan Pelaksanaannya Oleh Pihak Yang Menerima Izin dan/ atau Melakukan Perjanjian Kerja. | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala<br>Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**
**Dinas Syariat Islam Aceh**
**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**
**Jl. T. Nyak Arief No 221, Banda Aceh Telp/Fax.: (0651) 7551313, 7551312, 7551314 ; E-mail : dsi@acehprov.go.id**

# DAFTAR INFORMASI PUBLIK
# TAHUN 2022

**--- SETIAP SAAT –**

| NO. | RINGKASAN ISI INFORMASI | PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI | PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI | TEMPAT DAN WAKTU PEMBUATAN | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA | | | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CETAK | REKAM | ONLINE | |
| 1. | **Daftar Informasi Publik** | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | 5 Tahun |
| 2. | **Informasi Tentang Peraturan, Keputusan Dan/Atau Atau Kebijakan Badan Publik** Yang Sekurang-Kurangnya Terdiri Atas:<br>1) Dokumen Pendukung Seperti Naskah Akademis, Kajian atau Pertimbangan Yang Mendasari Terbitnya Peraturan, Keputusan Atau Kebijakan Tersebut<br>2) Masukan-Masukan Dari Berbagai Pihak atas Peraturan, Keputusan atau Kebijakan Tersebut<br>3) Risalah Rapat Dari Proses Pembentukan Peraturan, Keputusan atau Kebijakan Tersebut<br>4) Rancangan Peraturan, Keputusan atau Kebijakan Tersebut<br>5) Tahap Perumusan Peraturan, Keputusan atau Kebijakan Tersebut<br>6) Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan Yang Telah Diterbitkan; | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala<br>Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |
| 3. | **Seluruh Informasi Lengkap Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala** | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala<br>Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |
| 4. | **Informasi Tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, Dan Keuangan, Antara Lain:**<br>1) Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Personil dan Keuangan<br>2) Profil Lengkap Pimpinan Dan Pegawai Yang Meliputi Nama, Sejarah Karir atau Posisi, Sejarah Pendidikan, Penghargaan dan | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala<br>Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sanksi Berat Yang Pernah Diterima<br>3) Anggaran Badan Publik Secara Umum Maupun Anggaran Secara Khusus Unit Pelaksana Teknis Serta Laporan Keuangannya<br>4) Data Statistik Yang Dibuat dan Dikelola Oleh Badan Publik; | | | | | | | |
| 5. | **Surat-Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga Berikut Dokumen Pendukungnya;** | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |
| 6. | **Surat Menyurat Pimpinan atau Pejabat Badan Publik** Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsinya; | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |
| 7. | **Syarat-Syarat Perizinan, Izin Yang** Diterbitkan dan/atau Dikeluarkan Berikut Dokumen Pendukungnya, dan Laporan Penaatan Izin Yang Diberikan; | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |
| 8. | **Data Perbendaharaan atau Inventaris;** | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |
| 9. | **Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Publik;** | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |
| 10. | **Agenda Kerja Pimpinan Satuan Kerja;** | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |
| 11. | **Informasi Mengenai Kegiatan Pelayanan Informasi Publik** Yang Dilaksanakan, Sarana Dan Prasarana Layanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya, Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya, Anggaran Layanan Informasi Publik Serta Laporan Penggunaannya; | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |
| 12 | **Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum** Pelanggaran Yang Ditemukan Dalam Pengawasan Internal Serta Laporan Penindakannya; | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |
| 13. | **Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum** Pelanggaran Yang Dilaporkan Oleh Masyarakat Serta Laporan | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**
**Dinas Syariat Islam Aceh**
**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**
**Jl. T. Nyak Arief No 221, Banda Aceh Telp/Fax.: (0651) 7551313, 7551312, 7551314 ; E-mail : dsi@acehprov.go.id**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penindakannya; | | | | | | | |
| 14. | **Daftar Serta Hasil-Hasil Penelitian** Yang Dilakukan; | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |
| 15. | **Informasi Publik Lain Yang Telah Dinyatakan Terbuka** Bagi Masyarakat Berdasarkan Mekanisme Keberatan dan/atau Penyelesaian Sengketa | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |
| 16. | **Informasi Tentang Standar Pengumuman Informasi** Bagi Badan Publik Yang Memberikan Izin dan/dtau Melakukan Perjanjian Kerja Dengan Pihak Lain Yang Kegiatannya Berpotensi Mengancam Hajat Hidup Orang Banyak Dan Ketertiban Umum; | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |
| 17. | **Informasi dan Kebijakan** Yang Disampaikan Pejabat Publik Dalam Pertemuan Yang Terbuka Untuk Umum. | Dinas Syariat Islam Aceh | Kepala Dinas Syariat Islam Aceh | Banda Aceh, 2022 | √ | - | √ | **5 Tahun** |

**Banda Aceh, 27 Januari 2022,**
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**
**DINAS SYARIAT ISLAM ACEH**

**Dr. EMK ALIDAR, S.Ag, M.Hum**
**PEMBINA UTAMA MUDA**
**NIP. 19740626 199402 1 003**

# DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

| NO | JENIS INFORMASI | ALASAN PENGECUALIAN (DASAR HUKUM) | JANGKA WAKTU PENGECUALIAN | KONSEKUENSI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AKIBAT JIKA DIBUKA | MANFAAT |
| 1 | **Data Pribadi Pegawai**<br>Daftar riwayat hidup pegawai<br>Hasil general check up kesehatan pegawai<br>Hasil evaluasi kapabllitas/ intelektualitas/kompetensi/rekomendasi pegawai<br>Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai<br>Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank pegawal menduduki jabatan publik rahasia pribadi<br>Catatan yang menyangkut pribadi seorang pegawai berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal<br>Pegawai Negeri Sipil (PNS) Elektronik<br>Berkas dan Arsip Dokumen PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informsi Publik Pasal 17 huruf h; | Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan atau menduduki jabatan publik | Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi | Melindungi hak pribadi |
| 2 | **Penjatuhan Hukuman disiplin :**<br>Surat panggilan atas dugaan pelanggaran disiplin Pegawai<br>Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai<br>Berita acara pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin di Dinas<br>Keputusan hukuman disiplin dari Instansi terkait<br>Laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dari Pejabat Berwenang<br>Berita acara beserta resume dan notulen sidang Tim<br>Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin dari BKA<br>Keputusan Hukuman Disiplin dari BKA<br>dentitas Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h;<br>PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 31 ayat (1) dan (2);<br>Peraturan Kepala BKN No 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS | Sampai memperoleh persetujuan dari yang berwenang | Bertentangan dengan praduga tak bersalah | Melindungi hak pribadi yang bersifat rahasia |
| | **Dokumen Perceraian** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Identitas PNS yang mengajukan izin Perceraian/Perkawinan<br>Dokumen Notulensi rapat Tim Penyelesaian Kasus Perceraian | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h; | Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan atau menduduki jabatan publik | Akan Mengungkap Data pribadi PNS | Melindungi hak pribadi yang bersifat rahasia |
| 4 | **Daftar Rencana Penempatan PNS**<br>Data usulan penempatan<br>pemindahan dan pengangkatan PNS<br>Data usulan pemindahan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i; | Sampai diterbitkan SK | Akan menghambat proses penempatan dan pemindahan | Mencegah kolusi dan iklim yang kondusif di lingkungan kerja |
| 5 | Data Pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j;Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban | Sampai ada keputusan yang berkuatan hukum tetap | Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia | Melindungi hak pribadi yang bersifat rahasia |
| 6 | Penilaian prestasi kerja dan absensi pegawai | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h angka 4; | Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan | Mengungkapkan data pribadi pegawai | Melindungi hak pribadi yang bersifat rahasia |

Banda Aceh, 25 Mei 2022
KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

**Dr. EMK. ALIDAR, S. Ag., M. Hum**
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740626 199402 1 003